

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN KECEMASAN MENJELANG BEBAS PADA WARGA BINAAN LAPAS KELAS I SEMARANG YANG DIVONIS DI ATAS LIMA TAHUN

¹Venny Handayani M., ¹Dian Veronika Sakti Kaloeti

¹Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50725
venyhm19@gmail.com

ABSTRAK

Warga binaan yang mendekati masa bebas kerap menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, seperti ketakutan terhadap stigma sosial, kekhawatiran akan kehidupan setelah bebas, serta ketidakpastian masa depan. Peran keluarga sebagai lingkungan sosial yang pertama dan paling dekat dengan warga binaan memiliki peranan krusial dalam memberikan dukungan sosial di masa menjelang bebas tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang divonis di atas lima tahun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini melibatkan 165 warga binaan di Lapas Kelas I Semarang yang divonis di atas lima tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Sebanyak 116 warga binaan dijadikan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua skala psikologis yang dikonstruksi oleh peneliti, yaitu Skala Dukungan Sosial Keluarga (37 aitem, $\alpha = .96$) dan Skala Kecemasan Menjelang Bebas (29 aitem, $\alpha = .95$). Hasil analisis korelasi menggunakan *Spearman's Rho* dan menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas ($r_s = -.57, p < .05$), yang berarti semakin tinggi dukungan sosial keluarga, semakin rendah tingkat kecemasan warga binaan menjelang kebebasan. Dengan demikian, dukungan sosial keluarga merupakan variabel yang berhubungan erat dengan tingkat kecemasan menjelang bebas pada warga binaan.

Kata kunci: keluarga; kecemasan; warga binaan; lembaga pemasyarakatan

THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SOCIAL SUPPORT AND PRE-RELEASE ANXIETY AMONG INMATES AT CLASS I PENITENTIARY SEMARANG SENTENCED TO MORE THAN FIVE YEARS

¹Venny Handayani M., ¹Dian Veronika Sakti Kaloeti

¹Faculty of Psychology, Diponegoro University
Prof. Mr. Sunario Street, Tembalang, Semarang, Central Java 50725
venyhm19@gmail.com

ABSTRACT

Inmates approaching their release often experience complex psychological dynamics, including fear of social stigma, concerns about life after release, and uncertainty regarding their future. The family, as the primary and closest social environment for inmates, plays a crucial role in providing social support during this transitional period. This study aimed to examine the relationship between family social support and pre-release anxiety among inmates at Class I Penitentiary Semarang who were sentenced to more than five years. A quantitative research method was employed. The study population consisted of 165 inmates who had served at least two-thirds of their sentences. A total of 116 participants were selected using simple random sampling. Data were collected using two psychological scales developed by the researchers: the Family Social Support Scale (37 items, $\alpha = .96$) and the Pre-Release Anxiety Scale (29 items, $\alpha = .95$). Data analysis using Spearman's Rho correlation revealed a significant negative relationship between family social support and pre-release anxiety ($r_s = -.57$, $p < .05$), indicating that higher levels of family support are associated with lower levels of anxiety prior to release. These findings suggest that family social support is a key variable related to the level of pre-release anxiety experienced by inmates.

Keywords: family; anxiety; inmates; correctional facility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bergerak di bidang Pemasyarakatan dan berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah (Soerjowinoto, 2015). Lapas sebagai langkah terakhir dalam mekanisme sistem peradilan pidana bertugas dalam melakukan perubahan pada warga binaan untuk menjadi manusia baru (Saefudin, 2020). Lapas Kelas I Semarang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan warga binaan, dan pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Soerjowinoto, 2015).

Pembinaan di Lapas Kelas I Semarang memegang peranan penting dalam membantu warga binaan membangun kembali kepercayaan diri, harga diri, serta optimisme terhadap masa depan mereka (Hutauruk & Simamora, 2025). Selain itu, melalui program pembinaan, warga binaan tidak hanya diberikan bekal keterampilan untuk hidup mandiri, tetapi juga dibimbing agar menjadi pribadi yang taat hukum dan

berjiwa sosial. Proses pembinaan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga para warga binaan diharapkan dapat kembali berkontribusi positif setelah menjalani masa hukuman (Hutauruk & Simamora, 2025). Hasil penelitian Sophia dan Hanani (2025) di Lapas Kelas I Semarang mengungkapkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan serta kesadaran warga binaan akan pentingnya program tersebut. Ketika warga binaan merasakan manfaat nyata, seperti peningkatan keterampilan dan perubahan sikap, hal ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berkembang dan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik.

Namun demikian, pada kenyataannya, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak selalu berjalan secara merata. Menurut Sophia dan Hanani (2025), terdapat beberapa tantangan yang menjadi penghambat, antara lain minimnya partisipasi aktif dari warga binaan dalam program pembinaan. Selain itu, keterbatasan tenaga pengelola atau pembina menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan sarana dan bahan kerja yang dibutuhkan. Pengolahan hasil kerja warga binaan juga belum optimal karena jumlah mitra yang masih sedikit, sehingga potensi pengembangan keterampilan dan pemberdayaan belum maksimal. Faktor-faktor lain seperti kurangnya tenaga pembina yang berkompeten, jumlah pelaksana yang terbatas, serta fasilitas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Semarang. Respon yang kurang antusias dari sebagian warga binaan juga menjadi kendala dalam mencapai hasil pembinaan yang diharapkan.

Soerjowinoto (2015) juga menyatakan bahwa kelebihan kapasitas jumlah warga binaan di Lapas Kelas I Semarang menjadi salah satu faktor yang menghambat pola pembinaan di dalam lapas. Data terbaru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan terdapat 1.654 warga binaan yang tertampung di Lapas Kelas I Semarang (Ditjenpas, 2024). Namun, Lapas Kelas I Semarang hanya memiliki daya tampung sebanyak 663 warga binaan. Hal ini menunjukkan terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 149,47% di Lapas Kelas I Semarang. Selain berdampak pada terhambatnya pembinaan, kelebihan kapasitas di dalam lapas juga dapat berimplikasi negatif pada kesehatan fisik dan mental warga binaan, kualitas pelayanan kesehatan yang menurun, program rehabilitasi terganggu, risiko keamanan yang meningkat, aspek sosial warga binaan yang tidak terpenuhi, pelanggaran hak asasi manusia, serta stigma dan diskriminasi mantan warga binaan (Pratama & Sebyar, 2024).

Meskipun Lapas dirancang sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi, kehidupan sehari-hari warga binaan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan tekanan psikologis. Menjalani hukuman di dalam lapas merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan, namun proses tersebut tetap berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka (Edgemon & Clay-Warner, 2018; Cunha dkk., 2023). Terampasnya kebebasan, keterisolasian dari hubungan sosial dengan dunia luar, serta terbatasnya ruang gerak menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi stabilitas fisiologis dan psikologis warga binaan (Mardenny, 2017). Saefudin (2020) menambahkan bahwa hilangnya kemerdekaan serta label negatif yang melekat sejak di dalam lapas sering kali memicu munculnya berbagai gejala psikologis.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiaty dan Anindyajati (2013) terhadap 1808 warga binaan di Pulau Jawa menemukan bahwa 65% dari jumlah tersebut menunjukkan gejala gangguan psikologis. Studi tersebut juga mengidentifikasi empat gangguan psikologis yang dialami warga binaan, yaitu gangguan neurotis, ketergantungan zat, gangguan mood, dan psikotik. Hal ini dikarenakan kepadatan penghuni yang tinggi dan berlangsung lama, hukuman berat, dan minimnya ketersediaan tugas kerja (Edgemon & Clay-Warner, 2018).

Masa pembebasan yang semakin dekat juga memberikan dinamika psikologis tersendiri bagi warga binaan. Bagi banyak warga binaan, masa menjelang kebebasan merupakan fase yang sangat dinanti. Harapan untuk kembali ke tengah keluarga dan kehidupan yang serba terbatas di dalam lapas membuat warga binaan sangat menantikan kebebasan (Simamora dkk., 2019). Program pembinaan yang telah dijalani pun idealnya memberikan harapan hidup warga binaan agar mampu menghadapi kehidupan setelah bebas (Tursina, 2019). Namun, masa kebebasan yang seharusnya menjadi hal yang menggembirakan dan dinanti-nantikan oleh warga binaan, dapat berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan mencemaskan (Salim dkk., 2016).

Menurut Saefudin (2020), salah satu ketakutan warga binaan adalah ketika mendekati masa pembebasan. Hal tersebut dikarenakan warga binaan yang sadar akan rencana kebebasannya merasa malu, minder, dan takut ditolak oleh lingkungannya atas statusnya sebagai warga binaan sehingga menimbulkan kekhawatiran di dalam dirinya (Laili & Ro'isah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Liggins (2024) pada individu yang telah bebas menyatakan bahwa terdapat tiga tema yang menjadi tantangan sosial

bagi para warga binaan saat keluar dari penjara, yakni stigma dan stereotip, kurangnya sumber daya, dan kurangnya stabilitas keuangan.

Stigma sosial terhadap status mantan warga binaan menjadi tantangan utama yang mereka hadapi dalam menjalani proses reintegrasi ke masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang mantan warga binaan sebagai sosok negatif sehingga membuat penolakan dan kewaspadaan berlebihan (Ekawati, 2020). Masyarakat cenderung memandang mereka sebagai individu berbahaya, tidak dapat dipercaya, bahkan tidak mampu berubah, yang memperkuat sikap menjaga jarak dan memperbesar penolakan sosial (Fousiani & Prooijen, 2019). Stigma ini telah menjadi penghalang utama dalam proses reintegrasi karena merampas kesempatan kerja dan perumahan, serta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan psikologis (Semenza & Link, 2019; Subroto & Aliyandra, 2024). Hal ini juga mengakibatkan warga binaan ketakutan saat harus kembali masyarakat, memiliki pandangan diri yang negatif, dan merasa tidak berharga (Ardilla & Herdiana, 2013). Mereka juga mengembangkan keyakinan yang menstigmatisasi diri, yang memicu antisipasi diskriminasi dan dorongan untuk menarik diri dari lingkungan sosial (Moore et al., 2016). Kondisi ini memperparah rasa malu, rendah diri, serta kecemasan, karena mereka harus menghadapi kenyataan sosial yang penuh hambatan dan ketidakpastian (Hasan dkk., 2023; Hartini dkk., 2023; Saefudin, 2020; Salim dkk., 2016).

Warga binaan juga dihadapkan oleh tantangan-tantangan kehidupan setelah bebas lainnya, seperti kesulitan mencari tempat tinggal, pekerjaan, serta membangun

kembali hubungan dengan keluarga dan teman. Hal ini disebabkan oleh minimnya keterampilan dan pengalaman kerja akibat masa penahanan, tekanan finansial dari denda dan biaya hukum, serta peraturan-peraturan yang membatasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dan akses pendidikan (Massoglia & Remster, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Western dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah subjek penelitian, yaitu warga binaan yang sedang menjalani masa reintegrasi, mengalami pengangguran, dua per tiga menerima bantuan sosial, dan masih banyak yang bergantung pada keluarga akibat ketidakpastian tempat tinggal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan kecemasan dan juga isolasi pada warga binaan yang menjalani reintegrasi sosial. Selain itu, ketiadaan hunian yang pasti dan layak juga dapat memperparah perasaan keterasingan, kehilangan kendali atas hidup, serta memunculkan ketakutan terhadap lingkungan luar.

Kecemasan menjadi salah satu masalah yang sering dialami warga binaan, terutama saat mendekati masa pembebasan. Kecemasan adalah sesuatu yang alami dan merupakan reaksi dari stimulus, kesulitan, atau masalah yang dihadapi (Saefudin, 2020). Dalam konteks warga binaan, kekhawatiran yang dirasakan terkait dengan tantangan kehidupan setelah bebas dapat menimbulkan kecemasan dan dapat berujung pada munculnya gejala psikologis lain yang lebih mengganggu jika tidak ditangani dengan serius (Saefudin, 2020).

Studi menunjukkan lebih dari 80% warga binaan mengalami tingkat kecemasan tertentu selama periode menjelang pembebasan mereka (Yu dkk., 2016). Data tersebut mengindikasikan besarnya tekanan psikologis berupa kecemasan yang dialami warga

binaan saat menghadapi masa pembebasan yang akan segera datang. Perasaan cemas ini terkait dengan ancaman terhadap sistem diri mereka, terutama berkaitan dengan identitas diri, harga diri, relasi sosial, serta perubahan dan hilangnya status atau peran (Salim dkk., 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada dua warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang sedang menjalani dua per tiga ($\frac{2}{3}$) masa tahanannya, terdapat berbagai dinamika psikologis yang dirasakan oleh mereka. Saat mengetahui masa pembebasan semakin dekat, terdapat perasaan bahagia yang timbul dalam diri mereka karena akan segera bebas, tetapi ada juga perasaan gelisah dan takut. Salah satu warga binaan menyatakan bahwa dirinya khawatir akan adanya perubahan pada sikap dan perlakuan dari keluarga istrinya saat bebas nanti karena tindak pidana yang telah ia lakukan. Warga binaan lainnya mengaku bahwa dirinya mulai menarik diri dan menghindari interaksi dengan warga binaan lainnya di masa menjelang bebas saat ini. Selain itu, ia juga takut akan kepastian masa depan, stigma dan penolakan dari masyarakat, serta pengucilan dari keluarganya sendiri karena telah mencoreng nama keluarga.

Menurut Hartini dkk. (2023), kekhawatiran mengenai stigma sosial sebagai seorang mantan warga binaan, rasa malu terhadap keluarga, ketakutan tidak diterima di lingkungannya, dan perasaan bingung mengenai kegiatan yang harus dilakukan atau tentang pekerjaan setelah bebas menjadi pemicu terjadinya kecemasan menjelang bebas. Hasan dkk. (2023) juga menyatakan bahwa warga binaan merasakan khawatir akan masa depan mereka karena menyandang status sebagai mantan warga binaan,

sulitnya mendapatkan pekerjaan, kondisi ekonomi, stigma negatif dari masyarakat dan keluarga saat keluar dari lapas. Mereka juga takut akan balas dendam keluarga korban atas perbuatan mereka dan bagaimana menyesuaikan diri dengan dunia luar, terutama dalam menjalin pertemanan. Selain itu, cemas akan peran sebagai ibu dan istri, gelisah menunggu waktu berkumpul dengan keluarga, cemas mencari pekerjaan, dan kecemasan beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat setelah bebas juga memicu terjadinya kecemasan warga binaan menjelang bebas (Salim dkk., 2016).

Kondisi kecemasan menjelang bebas ini juga dapat diperparah oleh lamanya masa hukuman warga binaan (Salim, 2016). Masa hukuman yang panjang membuat individu lebih terisolasi, kehilangan kebebasan, dan kesulitan menerima kenyataan yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka (Crewe dkk., 2017). Penelitian menunjukkan bahwa warga binaan yang menjalani hukuman di atas lima tahun cenderung mengalami tingkat tekanan psikologis, terutama kecemasan, dan lebih rentan mengalami depresi jika dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman singkat (Otte dkk., 2017; Kaloeti dkk., 2017).

Kondisi kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik, terutama berkaitan dengan kecemasan menjelang bebas, tidak hanya berdampak pada proses reintegrasi sosial warga binaan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian oleh Okamura dkk. (2023) menunjukkan bahwa individu dengan gangguan kesehatan mental memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk masuk kembali ke dalam penjara dibandingkan dengan yang tidak mengalami gangguan tersebut. Jika warga binaan memiliki kesehatan mental yang baik selama

masa tahanan dan setelah bebas, risiko melakukan pelanggaran hukum kembali dapat dicegah dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial (Cunha dkk., 2023; Wallace & Wang, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Salim dkk. (2016) menemukan beberapa faktor yang memengaruhi kecemasan warga binaan menjelang bebas, yaitu usia, durasi masa hukuman, jarak waktu menuju kebebasan, dukungan dari keluarga, dan dukungan dari lingkungan sosial. Sebesar 77,66% kecemasan menjelang bebas dipengaruhi oleh dukungan sosial dan 70,25% oleh dukungan keluarga. Usia warga binaan memengaruhi kecemasan menjelang bebas sebesar 61,23%, yakni di rentang usia 18–40 tahun. Lama hukuman di atas tiga tahun juga menyumbang 46,95% dalam memengaruhi kecemasan menjelang bebas. Terakhir, sebesar 30,62% kecemasan menjelang bebas dipengaruhi oleh faktor waktu menjelang bebas, yaitu satu bulan.

Clone dan DeHart (2014) menemukan bahwa dukungan terbesar warga binaan berasal dari anggota keluarga. Dukungan keluarga merupakan suatu tindakan yang membantu anggota keluarganya untuk segera bangkit dari keadaan terpuruk dan menghadapi segala sesuatunya secara bersama-sama (Pandini, 2020). Naser dan Visser (2006) menyatakan bahwa hubungan dengan anggota keluarga sangat penting bagi sebagian besar warga binaan untuk mendukung keberhasilan mereka dalam proses penyatuan kembali ke masyarakat. Hubungan yang kuat antara warga binaan dengan keluarga atau teman dekat mereka memberikan pengaruh yang positif pada keberhasilan pasca-pembebasan (Sari, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan Urang dan Krsitianingsih (2023) menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga berhubungan secara negatif dengan kecemasan yang dialami oleh warga binaan. Irawan dkk. (2020) juga menemukan adanya korelasi antara tingkat dukungan sosial dengan tingkat kecemasan yang dialami saat menjelang bebas dalam konteks anak didik pemasyarakatan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Karindra dan Rifani (2022) bahwa dukungan sosial dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan berhubungan secara negatif. Regina dan Martina (2016) pada penelitiannya di Rutan Negara Banda Aceh menemukan bahwa ada hubungan bermakna antara dukungan keluarga dengan derajat kecemasan warga binaan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, ditemukan bahwa penelitian terdahulu telah mengungkap interaksi antara dukungan sosial dengan kecemasan menjelang bebas, akan tetapi tidak berfokus pada dukungan sosial keluarga. Selain itu, penelitian terdahulu terkait dukungan sosial keluarga dengan kecemasan pada warga binaan tidak secara spesifik menyasar kepada kecemasan menjelang bebas pada warga binaan. Dengan demikian, belum ada kejelasan terkait hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan, khususnya kepada warga binaan dengan vonis di atas lima tahun.

Fenomena kecemasan menjelang bebas juga akan menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh warga binaan yang menjalani hukuman lebih dari lima tahun. Durasi yang panjang ini menyebabkan individu mengalami keterputusasaan lebih lama dan meningkatkan risiko tekanan psikologis, khususnya kecemasan. Penelitian ini memfokuskan pada warga binaan di Lapas Kelas I Semarang yang menjalani hukuman

lebih dari lima tahun dan sedang berada dalam fase menjelang bebas. Kondisi Lapas Kelas I Semarang yang mengalami overkapasitas, terbatasnya akses pembinaan psikologis, serta tingginya risiko kecemasan pada masa transisi ini menjadikan Lapas Kelas I Semarang sebagai lokasi penelitian yang relevan dan menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian lanjutan terkait hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang divonis di atas lima tahun.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang divonis di atas lima tahun?

C. Tujuan

Untuk mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang divonis di atas lima tahun.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta praktik penelitian ilmiah dalam bidang psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi keluarga, dan psikologi forensik terkait hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi warga binaan pemasyarakatan mengenai pentingnya dukungan sosial keluarga dalam mengurangi kecemasan di masa menjelang kebebasan.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Temuan penelitian ini dapat memperkaya informasi, gambaran, dan literatur terkait hubungan dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan yang nantinya dapat menjadi dasar untuk merancang program reintegrasi yang efektif dengan mempertimbangkan peran dukungan sosial dari keluarga mereka.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan informasi dan sumber yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait dukungan sosial keluarga dan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan